

# Partisipasi Politik Perempuan dan Kelompok Muda dalam Demokrasi Indonesia

## Catatan Jurnal Perempuan

Partisipasi Politik Perempuan dan Kelompok Muda dalam Demokrasi Indonesia

## Artikel

Perempuan Muda dan Partai Politik: Dari *Descriptive Participation* menuju *Substantive Representation*  
Ani Widyani Soetjipto

Pemberdayaan Politik Perempuan Desa dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil  
Siti Azizah Namirah & Ida Ruwaida

Partisipasi dan Agensi: Perempuan Muda Indonesia dalam Advokasi UU TPKS  
Andi Misbahul Pratiwi

Sinergi Politik Harapan: Interseksionalitas Politik Pemuda dalam Feminisme  
Usep Hasan Sadikin

Agensi dan Kewarganegaraan Inklusif bagi Perempuan Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Peran HWDI dalam Penanganan Covid-19 di Jakarta  
Salsabila Widyadhari & Sri Lestari Wahyuningroem

Laki-laki Sebagai Sekutu Gerakan Feminis: Pelibatan Laki-Laki Sebagai Strategi Gerakan Advokasi yang Dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Sipil dalam Mendorong Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  
Nadia & Dirga Ardiansa

Belajar dari Aktivistik Perempuan Muda: Sebuah Cara Memengaruhi Kesadaran Politis Sejak Dini  
Ikhaputri Widiyanti & Retno Daru Dewi G. S. Putri

Diterbitkan oleh:

YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan  
No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019

# Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia  
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke [himah@jurnalperempuan.com](mailto:himah@jurnalperempuan.com))

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)

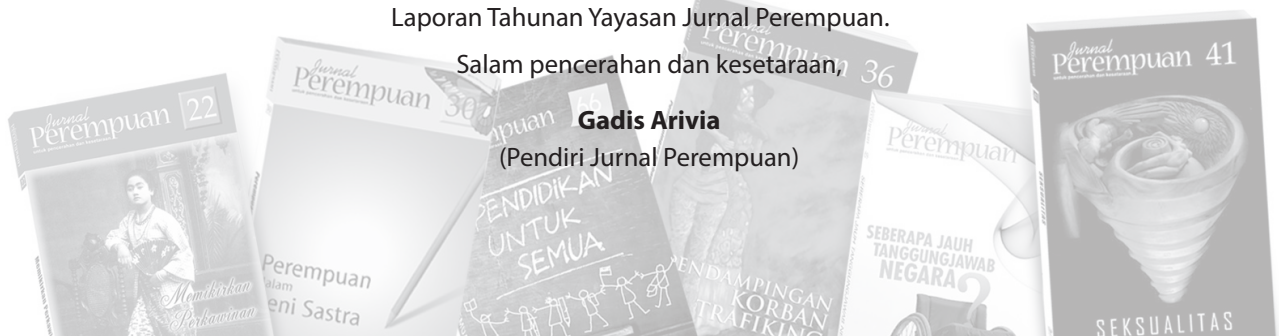
Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah  
(Hp 081807124295, email: [himah@jurnalperempuan.com](mailto:himah@jurnalperempuan.com)).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org) dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

**Gadis Arivia**

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

**PENDIRI**

Prof. Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno (Alm.)  
Ratna Syafrida Dhanny  
Asikin Arif, M.Fil. (Alm.)

**DEWAN PEMBINA**

Prof. Mari Elka Pangestu, Ph.D.  
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto

**DEWAN PENGAWAS**

Dr. Ir. Darwin Cyril Noerhadi, M.B.A.

**DEWAN REDAKSI**

Dr. Abby Gina Boang Manalu, M.Hum. (Jurnal Perempuan)  
Prof. Dr. Gadis Arivia (Sosiologi, Montgomery College, Takoma Silver Spring, Maryland, USA)  
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)  
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)  
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)  
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)  
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIP, Universitas Indonesia)  
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)  
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)  
Soe Tjen Marching, Ph.D. (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)  
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas Nasional)

**DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI**

Dr. Abby Gina Boang Manalu, M.Hum.

**MITRA BESTARI**

Prof. Mayling Oey-Gardiner, Ph.D. (Universitas Indonesia)  
Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)  
Prof. Dr. E. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)  
Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)  
Katharine McGregor, Ph.D. (University of Melbourne)  
Dr. (Iur) Asmin Fransiska, S.H., LL.M. (Universitas Katolik Atma Jaya)  
Dr. Irene Hadiprayitno (Leiden University)  
Prof. Jeffrey Winters (Northwestern University)  
Ro'fah, Ph.D. (UIN Sunan Kalijaga)  
Tracy Wright Webster, Ph.D. (University of Western Australia)  
Prof. Kim Eun Shil (Korean Ewha Womens University)  
Prof. Merlyna Lim (Carleton University)  
Prof. Claudia Derichs (Universitaet Marburg)  
Sari Andajani, Ph.D. (Auckland University of Technology)  
Prof. Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gadjah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Okayama University)  
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)  
Prof. Dr. Widjajanti M. Santoso, M.Litt. (Indonesian Institute of Sciences)  
Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Universitas Indonesia)  
Dr. Bagus Takwin (Universitas Indonesia)  
Dr. Sri Lestari Wahyuningroem (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)  
Francisia Saveria Sika Seda, Ph.D. (Universitas Indonesia)  
Dr. Ruth Indiah Rahayu, S.I.P. (Konsultan dan Peneliti)  
Mia Siscawati, Ph.D. (Universitas Indonesia)  
Dr. L.G. Saraswati Putri (Universitas Indonesia)  
Prof. Maria Lichtmann (Appalachian State University, USA)  
Assoc. Prof. Muhamad Ali (University California, Riverside)  
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (University of Notre Dame)  
Assoc. Prof. Paul Bijl (Universiteit van Amsterdam)  
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (President University)  
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (University of Copenhagen)

**REDAKSI**

Retno Daru Dewi G. S. Putri, M.A., M.Hum.  
Iqraa Runi Aprilia, S.Hum.  
Nada Salsabila, S.Hum.

**REDAKSI TAMU**

Ikhaputri Widiyanti, S.Hum., M.Si.

**SAHABAT JURNAL PEREMPUAN & MARKETING**

Himah Sholihah  
Iqraa Runi Aprilia, S.Hum.

**DESAIN & TATA LETAK**

Dina Yulianti

**HOTLINE PELANGGAN**

Himah Sholihah 0818 0712 4295 (SMS/WA)

**ALAMAT REDAKSI**

Alamanda Tower, 25<sup>th</sup> Floor  
Jalan T.B. Simatupang kavling 23-24, Jakarta Selatan  
Telepon: (+62) 21 2965 7992

E-mail: [yjp@jurnalperempuan.com](mailto:yjp@jurnalperempuan.com)  
[redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)

Twitter: [@jurnalperempuan](https://twitter.com/jurnalperempuan)  
Facebook: Yayasan Jurnal Perempuan

**WEBSITE**

[www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)  
[www.indonesiafeministjournal.org](http://www.indonesiafeministjournal.org)

Cetakan Pertama, Agustus 2023

Di dukung oleh



## **Ucapan Terima Kasih kepada Mitra Bestari dan Dewan Redaksi**

1. Dr. Nur Iman Subono
2. Francisia Saveria Sika Seda, Ph.D.
3. Prof. Dr. Sulistyowati Irianto
4. Dr. Pinky Saptandari
5. Mariana Amiruddin, M.Hum.
6. Dr. Sri Lestari Wahyuningroem
7. Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo
8. Dr. Ruth Indiah Rahayu, S.I.P.
9. Prof. Dr. Gadis Arivia
10. Dr. Ida Ruwaida Noor, M.Si.
11. Prof. Dr. Widjajanti M. Santoso, M.Litt.

## Daftar Isi

### Catatan Jurnal Perempuan

Partisipasi Politik Perempuan dan Kelompok Muda dalam Demokrasi Indonesia/ <i>Political Participation of Women and Youth in Indonesian Democracy</i> .....	v-vi
Abby Gina Boang Manalu	

### Artikel

- Perempuan Muda dan Partai Politik: Dari *Descriptive Participation* menuju *Substantive Representation*/  
*Young Women and Political Parties: From Descriptive Participation to Substantive Representation* ..... 87-100  
Ani Widayanti Soetjipto
- Pemberdayaan Politik Perempuan Desa dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil/  
*Political Empowerment of Village Women and the Role of Civil Society Organizations* ..... 101-115  
Siti Azizah Namirah & Ida Ruwaida
- Partisipasi dan Agensi: Perempuan Muda Indonesia dalam Advokasi UU TPKS/  
*Participation and Agency: Indonesian Young Women in Advocating Sexual Violence Crime Law* ..... 117-131  
Andi Misbahul Pratiwi
- Sinergi Politik Harapan: Interseksionalitas Politik Pemuda dalam Feminisme/  
*The Politics of Hope Synergy: the Intersectionality of Youth Politics in Feminism* ..... 133-147  
Usep Hasan Sadikin
- Agensi dan Kewarganegaraan Inklusif bagi Perempuan Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Peran HWDI  
dalam Penanganan Covid-19 di Jakarta/*Agency and Inclusive Citizenship for Women with Disabilities:  
A Case Study of the Role of HWDI in Handling Covid-19 in Jakarta* ..... 149-160  
Salsabila Widyadhari & Sri Lestari Wahyuningroem
- Laki-Laki sebagai Sekutu Gerakan Feminis: Pelibatan Laki-Laki sebagai Strategi Gerakan Advokasi yang  
Dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Sipil dalam Mendorong Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana  
Kekerasan Seksual/*Men as Allies of the Feminist Movement: Men's Involvement as a Strategy for the Advocacy  
Movement Carried Out by Civil Society Networks in Encouraging the Ratification of the Sexual  
Violence Crime Law* ..... 161-173  
Nadia & Dirga Ardiansa
- Belajar dari Aktivistik Perempuan Muda: Sebuah Cara Memengaruhi Kesadaran Politik Sejak Dini/  
*Learning from Young Women Activists: A Way to Influence Early Political Awareness* ..... 175-188  
Ikhaputri Widiyanti & Retno Daru Dewi G. S. Putri



# Partisipasi Politik Perempuan dan Kelompok Muda dalam Demokrasi Indonesia

## *Political Participation of Women and Youth in Indonesian Democracy*

Hukum dan kesepakatan internasional menjamin hak perempuan dan kelompok muda untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang berdampak pada hidup mereka. Namun realitanya tidak demikian, secara umum, akses untuk terlibat dalam pembuatan keputusan kerap mengeksklusi perempuan dan kelompok muda.

Menurut UN Women (2023), partisipasi perempuan dalam kepemimpinan, politik, dan ranah publik penting untuk mencapai *Sustainable Development Goals* pada tahun 2030. Namun, data global menunjukkan perempuan tidak terepresentasi di semua lini dan pencapaian paritas gender masih sangat jauh dari harapan. Berdasarkan data Inter-Parliamentary Union (IPU), proporsi perempuan dalam kursi parlemen adalah sebesar 11,3 persen pada tahun 1995 dan 26,5 persen di tahun 2023. Hanya enam negara yang berhasil mencapai 50 persen di parlemen, seperti Rwanda (61 persen), Kuba (53 persen), Nikaragua (52 persen), Meksiko (50 persen), Selandia Baru (50 persen), dan Persatuan Emirat Arab (UEA) dengan jumlah 50 persen. 23 negara mencapai angka 40 persen di 13 negara di Eropa, enam di Afrika, tiga di Amerika Latin dan Karibia, dan hanya satu di Asia. Data yang sama juga menunjukkan hingga 1 Januari 2023, hanya 17 negara yang memiliki 34 kepala negara dan 19 negara memiliki kepala pemerintahan. Artinya, dengan laju yang sangat lambat seperti ini dibutuhkan 130 tahun untuk perempuan mencapai posisi penting di ranah publik. Gambaran serupa juga dialami oleh Indonesia. Berdasarkan hasil pemilu 2019 misalnya, keterwakilan perempuan di legislatif berada pada angka 20,8 persen (KPU 2019). Dengan demikian, Indonesia berada di peringkat 120 dari 187 negara.

Artinya, meski sudah ada kemajuan dalam partisipasi perempuan dalam politik, ada “atap kaca” dalam politik formal maupun informal yang harus diretas. Perempuan masih mengalami diskriminasi dan hambatan, termasuk norma budaya, norma sosial, dan akses terhadap sumber daya keuangan sehingga terhalang untuk dapat berpartisipasi secara utuh sebagai pengambil keputusan.

Dua puluh lima tahun setelah diadopsinya Deklarasi Beijing, perempuan khususnya perempuan muda masih minim keterwakilan dalam seluruh tingkat kepemimpinan, parlemen, dan kehidupan publik sehingga kesetaraan gender dalam politik masih jauh dari harapan. Bila dilihat lebih mendalam, IPU menunjukkan bahwa keterlibatan dan juga keterwakilan perempuan muda di dalam parlemen masih sangat minim yaitu sekitar 2,2 persen. Padahal perempuan muda adalah kelompok yang terdampak dari dibuatnya sebuah kebijakan publik sehingga mereka seharusnya terlibat dalam negosiasi politik. Ketersingkirannya perempuan dalam politik antara lain disebabkan oleh kebijakan diskriminatif, norma bias gender, dan berbagai praktik ketimpangan struktural. Situasi ini sesungguhnya adalah bentuk pelanggaran terhadap hak politik dan mencederai prinsip inklusivitas dalam demokrasi. Meskipun saat ini telah banyak perempuan mencalonkan diri dalam pemilu, tetapi jumlahnya masih jauh di belakang laki-laki. Stigma dan stereotipe gender masih menjadi landasan mempertanyakan kapasitas politik perempuan. Secara khusus, bagi perempuan dari kelompok muda, tantangan partisipasi politik menjadi lebih pelik. Selain diskriminasi gender, mereka juga mengalami diskriminasi karena usia atau dikenal sebagai ageisme. Dalam ruang sosial dan politik, perempuan muda dianggap tidak punya pengalaman dan pengetahuan politik. Keterlibatan perempuan dan perempuan muda secara formal dan informal masih jauh dari cita-cita keadilan gender dalam ranah politik formal, khususnya pemilu. Mereka ditarget untuk didulang suaranya, tapi tanpa dilibatkan secara proporsional aspirasinya dalam berbagai tingkat kepemimpinan (baik di komunitas, lokal, hingga nasional).

Pemikir feminisme, Young (1993) dan Phillips (2017) telah menyatakan tentang pentingnya keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam politik. Menurut sejumlah sarjana feminis, politik yang menghasilkan transformasi haruslah melibatkan berbagai kelompok yang berbeda. Transformasi sosial hanya dimungkinkan

dengan mendialogkan berbagai pengalaman dan kepentingan yang berbeda. Penting untuk mengeksplisitkan adanya perbedaan gender dan berbagai perbedaan lain, termasuk usia. Tanpa pelibatan dan pengakuan maka prejudis dari kelompok dominan akan terus direproduksi. Para sarjana feminis percaya bahwa demokrasi yang egaliter hanya dapat didekati jika kategori yang didiamkan seperti gender dan berbagai interseksi identitas lainnya dikenali dan direspons secara memadai.

Partisipasi politik adalah prasyarat paling mendasar untuk mendorong kesetaraan gender dan juga demokrasi yang sesungguhnya. Partisipasi yang dimaksudkan tidak terbatas pada hadirnya pemimpin perempuan di dunia politik dan juga menghadirkan kebijakan yang sensitif gender, tetapi mencakup juga pada keterlibatan pendidikan politik bagi masyarakat secara luas dan membuka ruang partisipasi dalam politik keseharian, yang dapat kita temui dari kerja-kerja jaringan perempuan melalui aktivisme. Bentuk partisipasi dapat berupa: pendidikan dan kampanye publik terkait dukungan partisipasi politik perempuan; menyuarkan hak dan kepentingan politik kelompok marginal; berkolaborasi dengan laki-laki untuk mendorong kesetaraan dalam

politik dan kebijakan; dan lainnya—seperti dipaparkan dalam tujuh artikel topik empu di JP edisi ini.

JP edisi 115 bermaksud membangun diskursus tentang pentingnya partisipasi perempuan dan kelompok muda dalam politik. Secara khusus, JP 115 membahas terkait: pentingnya representasi substantif perempuan dalam politik Indonesia; partisipasi politik perempuan dan kelompok muda sebagai warga negara yang utuh; gerakan sosial dan aktivisme: partisipasi bermakna perempuan dan anak muda dalam politik informal; dan partisipasi politik yang merangkul perbedaan dan menjamin hak kelompok rentan. Dengan menjamin partisipasi penuh perempuan dan kelompok muda dalam politik, artinya kita bergerak menumbuhkan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Partisipasi politik yang inklusif akan menghasilkan tata kelola yang lebih baik, peningkatan stabilitas ekonomi, dan juga kohesi sosial yang lebih baik. Jurnal Perempuan melalui edisi 115 hendak menyuarkan bahwa mengejar kesetaraan gender dalam politik bukan hanya kewajiban etis — melainkan prasyarat mendasar untuk menghasilkan masyarakat yang sejahtera, setara, adil, dan inklusif bagi kita semua (**Abby Gina**).

**Ani Widayani Soetjipto**

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

**Perempuan Muda dan Partai Politik: Dari *Descriptive Participation* menuju *Substantive Representation***

*Young Women and Political Parties: From Descriptive Participation to Substantive Representation*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 28 No. 2, Agustus 2023, hlm. 87–100, 1 gambar, 29 daftar pustaka

The low level of political participation among women in general, including young women, in Indonesia can be explained through three reasons. Firstly, women face a challenging playing field because politics is predominantly characterized by a masculine culture. Secondly, in their pursuit of political engagement, women encounter several obstacles, such as patriarchal structures, sexist and ageist views, and social class barriers. Thirdly, young women are also hindered by political nepotism, lack of party support, limited political knowledge, and financial constraints. This paper utilizes the conceptual framework of Women and Political Party by Lovenduski (1997), Squires (2007), Ann Phillips' theory of women's representation, as well as the works of Young, Mouffe, Childs, and Krook to examine the dynamics of young women and political parties in Indonesia from the 2019 elections to the upcoming 2024 elections. The focus is on the interconnection between descriptive participation and substantive representation. The research methodology employed involves a critical analysis of existing literature supplemented by interviews conducted with young women actively involved in five political parties qualified as participants in the 2024 elections (Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, and PSI), including both ordinary party members and those who were elected as members of the DPR (People's Representative Council of Indonesia) in the 2019 elections.

Keywords: young women, political parties, political representation

Rendahnya partisipasi politik perempuan pada umumnya termasuk perempuan muda di Indonesia dapat dijelaskan melalui tiga alasan. *Pertama*, perempuan menghadapi medan tanding yang berat karena politik memiliki kultur maskulin. *Kedua*, untuk bertarung di arena politik, perempuan dihadapkan pada beberapa halangan: patriarki, pandangan seksis dan ageisme, dan kelas sosial. *Ketiga*, perempuan muda juga terhalang karena politik kekerabatan, minimnya dukungan dalam partai, minim pengetahuan politik, dan kendala finansial. Tulisan ini menggunakan kerangka pemikiran *Women and Political Party* dari Lovenduski (1997), Squires (2007), teori representasi perempuan Anne Phillips, Young, Mouffe, juga Childs dan Krook untuk membahas perkembangan dinamika perempuan muda dan partai politik di Indonesia pada Pemilu 2019 hingga Pemilu 2024 mendatang dan berfokus pada keterkaitan antara partisipasi deskriptif dan representasi substantif. Metode penelitian yang dilakukan adalah analisa kritis terhadap studi pustaka yang dilengkapi dengan wawancara dengan perempuan muda yang aktif di lima partai yang lolos sebagai peserta pemilu 2024 (Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, dan PSI) baik yang menjadi kader biasa maupun mereka yang telah terpilih menjadi anggota DPR pada pemilu 2019.

Kata kunci: perempuan muda, partai politik, representasi politik

**Siti Azizah Namirah & Ida Ruwaida**

Universitas Indonesia

**Pemberdayaan Politik Perempuan Desa dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil**

*Political Empowerment of Village Women and the Role of Civil Society Organizations*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 28 No. 2, Agustus 2023, hlm. 101–115, 3 tabel, 2 gambar, 37 daftar pustaka

This article reviews the role of civil society organizations (CSOs) in collective empowerment, in order to encourage women to transform their gender roles, especially in the political field. Various studies on women's political empowerment have been carried out, but most of them still focus on the issue of participation and not much has discussed women's collective action. Therefore, political empowerment in this study is seen in a more comprehensive manner by referring to the conception of Sundström et al. (2017), namely from the dimensions of choice, agency, and participation. This article is more based on a literature review which is supported by the results of a case study at Yayasan PEKKA, known as a CSO which focuses its activism on women, especially in rural areas. The findings of the study show that the empowerment process in principle begins with strengthening individual capacity, but women's critical power and ability to articulate the interests of women and other marginal groups is still questionable (choice dimension). This is a modality for strengthening group and institutional capacity (agency dimension), so as to be able to encourage the active role of women in various stakeholder forums both at the village and district levels (participation dimension). An integrative and sustainable model of empowerment is needed to strengthen women's political position, including encouraging women's power-within-based leadership, namely leadership that promotes collective action, or what is known as social power.

Keywords: collective political empowerment, women empowerment, civil society organization, choice, agency, participation, power within, bargaining position

Artikel ini mengulas peran organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam pemberdayaan kolektif, guna mendorong perempuan untuk mentransformasikan peran gendernya, khususnya di bidang politik. Berbagai studi tentang pemberdayaan politik perempuan sudah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada isu partisipasi dan tidak banyak yang mengulas aksi kolektif perempuan. Sebab itu, pemberdayaan politik dalam kajian ini dilihat secara lebih komprehensif dengan merujuk pada konsepsi Sundström et al. (2017), yakni dari dimensi *choice*, *agency*, dan partisipasi. Tulisan ini lebih bertumpu pada kajian literatur yang ditopang hasil studi kasus pada Yayasan PEKKA yang dikenal sebagai OMS yang memfokuskan aktivismenya pada perempuan, khususnya di perdesaan. Temuan studi menunjukkan bahwa proses pemberdayaan prinsipnya diawali dengan penguatan kapasitas individual, namun daya kritis perempuan dan kemampuannya mengartikulasikan kepentingan perempuan dan kelompok marginal lainnya masih dipertanyakan (dimensi *choice*). Hal ini menjadi modalitas penguatan kapasitas kelompok dan kelembagaannya (dimensi *agency*), sehingga mampu mendorong peran aktif perempuan di berbagai forum pemangku kepentingan baik di tingkat desa maupun tingkat kabupaten (dimensi partisipasi). Model

pemberdayaan yang integratif dan berkesinambungan diperlukan guna menguatkan posisi politik perempuan, termasuk mendorong kepemimpinan perempuan yang berbasis *power-within* yakni kepemimpinan yang mengedepankan aksi kolektif, atau yang dikenal dengan kekuasaan sosial (*social power*).

Kata kunci: pemberdayaan politik kolektif, pemberdayaan perempuan, organisasi masyarakat sipil, pilihan, agensi, partisipasi, *power within*, posisi tawar

**Andi Misbahul Pratiwi**  
Pusat Riset Gender Universitas Indonesia

### **Partisipasi dan Agensi: Perempuan Muda Indonesia dalam Advokasi UU TPKS**

*Participation and Agency: Indonesian Young Women in Advocating Sexual Violence Crime Law*

Kode Naskah: DDC 305  
Jurnal Perempuan, Vol. 28 No. 2, Agustus 2023, hlm. 117–131, 2 tabel, 48 daftar pustaka

Since a decade ago, the women's movement in Indonesia has consolidated its power to advocate for policies aimed at eliminating sexual violence through legislative advocacy and public campaigns. These efforts were a response to the increasing cases of sexual violence and the absence of a legal framework to address the issue. In the process of policy advocacy, young women have played a crucial role by participating in formal and informal political processes, although their participation has often been overlooked and unrecognized. This research examines the dynamics of young women's activism in various forms at the national level in the advocacy process for Sexual Violence Crime Law (UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual/UU TPKS). This research aims to demonstrate the role and forms of activism among young women in advocating policies related to sexual violence. The study utilizes a qualitative methodology through in-depth interviews with eight young women activists involved in the advocacy, lobbying, and campaigning to pass the bill. The research finds that young women face various barriers and challenges, but simultaneously demonstrate their agency in the policy advocacy process.

Keywords: young women, participation, agency, TPKS law

Sejak satu dekade yang lalu, gerakan perempuan di Indonesia telah mengkonsolidasikan kekuatan mereka untuk memperjuangkan kebijakan penghapusan kekerasan seksual melalui advokasi legislatif dan kampanye publik. Upaya ini adalah respons dari meningkatnya kasus kekerasan seksual dan ketiadaan kerangka hukum untuk menangani masalah tersebut. Dalam proses advokasi kebijakan tersebut, perempuan muda memainkan peran penting dengan berpartisipasi dalam proses politik (formal dan informal), namun partisipasi mereka kurang terlihat dan mendapatkan pengakuan. Penelitian ini mengkaji dinamika aktivisme perempuan muda dalam berbagai bentuk di tingkat nasional dalam proses advokasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan peran dan bentuk aktivisme perempuan muda dalam advokasi kebijakan terkait kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif melalui wawancara mendalam pada 8 aktivis perempuan muda yang terlibat dalam proses advokasi, lobi, dan kampanye untuk mengesahkan RUU tersebut. Penelitian menemukan bahwa perempuan muda mengalami berbagai hambatan dan tantangan tetapi secara bersamaan menunjukkan agensi mereka dalam proses advokasi kebijakan.

Kata kunci: perempuan muda, partisipasi, agensi, UU TPKS

**Usep Hasan Sadikin**  
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

### **Sinergi Politik Harapan: Interseksionalitas Politik Pemuda dalam Feminisme**

*The Politics of Hope Synergy: the Intersectionality of Youth Politics in Feminism*

Kode Naskah: DDC 305  
Jurnal Perempuan, Vol. 28 No. 2, Agustus 2023, hlm. 133–147, 1 tabel, 13 gambar, 49 daftar pustaka

Indonesian youth experience age discrimination (ageism) according to the Domination Matrix in the form of legal structural dominance and cultural hegemony. Law Number 40 of 2009 on Youth defines youth as citizens aged 16-30 years, but a number of political positions in Law Number 7 of 2017 on Elections and Law Number 10 of 2016 on Local Elections have conditions that prohibit youth ages. All youths are prohibited from becoming president/deputy which is implied by the existence of a minimum age requirement of 40 years, governor/deputy (30), and members of the General Election Commission/Election Supervisory Body at central (40), provincial (35) and district/city levels (30). Culturally, the ageism which judges youth to be incapable of leading is natural with the fact that youth have never nominated a youth minister and chairman of National Committee of Indonesian Youth (KNPI). It is important for young people to study the politics of hope for feminism, which in history succeeded in removing the ban on women's suffrage and succeeded in obtaining political affirmation of at least 30%. As a significant number of citizens, the intersectionality of youth in feminism can be a synergy to achieve a more representative parliament, by recognizing one another's identities within the framework of political expectations.

Keywords: politics of hope, ageism, youth, intersectionality

Pemuda Indonesia mengalami diskriminasi usia (ageisme) yang menurut Matriks Dominasi berbentuk dominasi struktural hukum dan hegemonik kultural. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengartikan pemuda sebagai warga negara berusia 16–30 tahun, namun sejumlah jabatan politik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada punya syarat yang melarang usia pemuda. Semua pemuda dilarang menjadi presiden/wakilnya yang tersirat dengan adanya syarat usia minimal 40 tahun, gubernur/wakilnya (30), serta anggota Komisi Pemilihan Umum/Badan Pengawas Pemilu tingkat pusat (40), provinsi (35), dan kabupaten/kota (30). Secara kultural, ageisme yang menilai pemuda tidak mampu memimpin menjadi kewajaran dengan fakta bahwa, pemuda tidak pernah menjabat menteri kepemudaan dan ketua umum organisasi pemuda nasional (KNPI). Pemuda penting mempelajari politik harapan feminisme yang dalam sejarah berhasil menghapus larangan hak pilih perempuan dan berhasil mendapatkan politik afirmasi minimal 30%. Sebagai warga yang berjumlah signifikan, interseksionalitas pemuda dalam feminisme bisa menjadi sinergi untuk mencapai parlemen yang lebih representatif, dengan cara pengakuan identitas satu sama lain dalam bingkai politik harapan.

Kata kunci: politik harapan, ageisme, pemuda, interseksionalitas

**Salsabila Widyadhari & Sri Lestari Wahyuningroem**  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

### **Agensi dan Kewarganegaraan Inklusif bagi Perempuan Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Peran HWDI dalam Penanganan Covid-19 di Jakarta**

*Agency and Inclusive Citizenship for Women with Disabilities: A Case Study of the Role of HWDI in Handling Covid-19 in Jakarta*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 28 No. 2, Agustus 2023, hlm. 149–160, 48 daftar pustaka

Persons with disabilities experience vulnerability in fulfilling their right to protection in a pandemic situation. This study aims to examine the participation process of groups of persons with disabilities, namely the Indonesian Association of Women with Disabilities (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia – HWDI) through the struggle for disability protection during the Covid-19 period in DKI Jakarta. This study uses the perspective of inclusive citizenship to see efforts to involve active participation of citizens in encouraging the fulfillment of rights by the government. This study uses a descriptive qualitative method with narrative analysis techniques. The results of the study show that although HWDI has been able to influence the DKI Jakarta provincial government in several policies, there are rights that still need to be fulfilled in the dimension of inclusive citizenship. These rights include social, civil, and political rights which have not been fulfilled by the government, which has implications for persons with disabilities not being further involved in handling the Covid-19 pandemic.

Keywords: persons with disabilities, inclusive citizenship, disability protection rights from disasters.

Penyandang disabilitas mengalami kerentanan untuk memenuhi haknya atas perlindungan dalam situasi pandemi. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji proses partisipasi kelompok penyandang disabilitas yaitu Himpunan Perempuan Penyandang Disabilitas Indonesia (HWDI) melalui perjuangan perlindungan disabilitas pada masa pandemi Covid-19 di DKI Jakarta. Kajian ini menggunakan perspektif kewargaan inklusif untuk melihat upaya pelibatan partisipasi aktif warga negara dalam mendorong pemenuhan hak oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis naratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun HWDI telah mampu mempengaruhi Pemprov DKI Jakarta dalam beberapa kebijakan, namun dalam dimensi kewargaan inklusif masih terdapat hak-hak yang belum terpenuhi. Hak ini antara lain hak sosial, hak sipil, dan hak politik yang belum terpenuhi oleh pemerintah, implikasinya penyandang disabilitas tidak dilibatkan lebih jauh pada penanganan pandemi Covid-19.

Kata kunci: penyandang disabilitas, kewargaan Inklusif, hak perlindungan disabilitas dari bencana

---

**Nadia<sup>1</sup> & Dirga Ardiansa<sup>2</sup>**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia<sup>1</sup> & Universitas Indonesia<sup>2</sup>

**Laki-Laki sebagai Sekutu Gerakan Feminis: Pelibatan Laki-Laki sebagai Strategi Gerakan Advokasi yang Dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Sipil dalam Mendorong Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

*Men as Allies of the Feminist Movement: Men's Involvement as a Strategy for the Advocacy Movement Carried Out by Civil Society Networks in Encouraging the Ratification of the Sexual Violence Crime Law*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 28 No. 2, Agustus 2023, hlm. 161–173, 1 gambar, 28 daftar pustaka

This research discusses the advocacy strategy carried out by the Civil Society Network (JMS) by involving men to push for the ratification of the TPKS Law. By referring to the theory of the strategic capacity of gender equality policy advocates by Htun and Weldon, JMS has used organizational capacity through strategies of (1) framing demands; (2) building networks, and (3) lobbying policymakers. This study uses a qualitative method by conducting in-depth interviews to obtain primary

data and collecting secondary data through a study of documents including regulations, news, and previously existing scientific papers. The findings from this study indicate that JMS involves men in advocacy strategies that are carried out by utilizing the privileges of men. For instance, the involvement of male religious leaders to counter the narrative of rejection of the TPKS Law which considers the TPKS Law to be inconsistent with the religious and moral values of the Indonesian people. Apart from that, JMS also involves male legislators who have a strategic position as Chairperson of the TPKS Law Working Committee to help lobby other members of the Indonesian Parliament.

Keywords: advocacy strategy, JMS, allies, sexual violence

Penelitian ini membahas salah satu strategi advokasi yang dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) yaitu dengan melibatkan laki-laki untuk mendorong pengesahan UU TPKS. Mengacu pada teori kapasitas strategis advokat kebijakan kesetaraan gender yang dikemukakan oleh Htun dan Weldon, JMS telah menunjukkan kapasitas pengorganisasian melalui strategi (1) membingkai tuntutan; (2) membangun jejaring, dan (3) melakukan lobi dengan para pembuat kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam untuk memperoleh data primer dan mengumpulkan data sekunder melalui studi dokumen mencakup regulasi, berita, dan karya ilmiah yang telah ada sebelumnya. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa JMS melibatkan laki-laki dalam strategi advokasi yang dilakukan dengan memanfaatkan privilese yang dimiliki oleh laki-laki. Misalnya, keterlibatan tokoh agama laki-laki untuk melawan narasi penolakan UU TPKS yang menganggap UU TPKS tidak sesuai dengan nilai agama dan moral masyarakat Indonesia. Selain itu, JMS juga melibatkan anggota legislatif laki-laki yang memiliki posisi strategis sebagai Ketua Panja UU TPKS untuk membantu lobi kepada anggota DPR RI lainnya.

Kata kunci: strategi advokasi, JMS, sekutu, kekerasan seksual

---

**Ikhaputri Widiyanti<sup>1</sup> & Retno Daru Dewi G. S. Putri<sup>2</sup>**  
Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan,  
Universitas Indonesia<sup>1</sup> & Jurnal Perempuan<sup>2</sup>

**Belajar dari Aktivistis Perempuan Muda: Sebuah Cara Memengaruhi Kesadaran Politik Sejak Dini**

*Learning from Young Women Activists: A Way to Influence Early Political Awareness*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 28 No. 2, Agustus 2023, hlm. 175–188, 1 tabel, 18 daftar pustaka

This research emphasizes the importance of involving young women in various activism. Problems arise when young women are often considered immature to be involved in social and political movements. Apart from being supported by a patriarchal mindset that tends to subordinate women's experience, there is an intersectional problem where young people need more knowledge to make changes. In fact, one way to encourage active representation of women in political space is to encourage involvement from a young age. This research explores the activism experiences of young women who influence their respective communities. Data was collected through Focus Group Discussion (FGD) and strengthened through literature studies. The data is managed using a political participation theory approach, as well as the influence of affect theory in digital activism. The findings in this research show that young women's knowledge is just as essential in the political space. Their advocacy is full of the spirit of the times, so they can have a strong influence on other young women through the community they have built.

Keywords: youth community advocacy and networking, young women activists, young women's political participation

Penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan perempuan muda dalam berbagai aktivisme. Persoalan muncul ketika perempuan muda sering kali dianggap belum dewasa untuk terlibat dalam gerakan sosial dan politik. Selain didukung dengan pola pikir patriarkal yang cenderung memorduakan pengalaman perempuan, ada persoalan interseksional yang menganggap bahwa anak muda tidak mempunyai cukup pengetahuan dalam melakukan perubahan. Padahal salah satu cara untuk mendorong representasi aktif perempuan di ruang politik adalah dengan mendorong keterlibatan sejak muda. Penelitian ini menggali berbagai pengalaman aktivisme perempuan muda yang memiliki pengaruh di komunitas mereka masing-masing. Data

dikumpulkan melalui *Focus Group Discussion (FGD)*, serta diperkuat melalui studi literatur. Data tersebut dikelola dengan pendekatan teori partisipasi politik, serta pengaruh teori *affect* dalam aktivisme digital. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perempuan muda sama pentingnya dalam ruang politik. Advokasi yang mereka lakukan penuh dengan semangat pada zamannya, sehingga dapat memberi pengaruh kuat bagi perempuan muda lain lewat komunitas yang mereka bangun.

Kata kunci: advokasi dan jejaring komunitas pemuda, aktivis perempuan muda, partisipasi politik perempuan muda

## ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

**Jurnal Perempuan** (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada ([redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:  
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, [http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational\\_for\\_PSWG\\_en\\_Indonesia.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf)  
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.  
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi [redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com) untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Alamanda Tower, 25th Floor,  
Jalan T.B. Simatupang kavling  
23-24, Jakarta Selatan  
Telepon: (62) 21 2965 7992

